

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, dan SILPA
TERHADAP BELANJA MODAL dan DAMPAKNYA KEPADA
PERTUMBUHAN EKONOMI PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dessyana Lourine Talluta, Rossy Lambelanova, Ella Wargadinata

Magister Ilmu Terapan IPDN, Jatinangor

Email: dlourinetalluta@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of PAD, Balancing Funds in this case Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Grant (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Budget Financing Surplus (SILPA) on Capital Expenditures and the impact on the Economic Growth of the Regional Government of Kupang City, East Nusa Tenggara Province. This research used mixed methods, with sequential explanatory models, where data collection and quantitative analysis were carried out in the first stage by using secondary data. Population in this research are Statement of Budget Realization and Gross Domestic Regional Product Report by Kupang City Government with 13 years samples from 2005 to 2017. Then followed by collection and analysis of qualitative data in the second stage through interviews, in order to strengthen the results of quantitative research conducted in the first phase. To test and prove the research hypothesis, the analytical method used to test the effect of PAD, DBH, DAU, DAK, and SILPA on Capital Expenditure is Multiple Linear Regression and to examine the Impact of Capital Expenditures on Economic Growth, Simple Linear Regression is used.

Based on the results of data analysis it can be concluded that through t test, partially PAD variable gives significant influence towards capital expenditure, it is showed by significant influence in amount of $0.001 < 0,05$ probability value. DAU gives significant influence towards capital expenditure, it is showed by significant influence in amount of $0.021 < 0.05$ probability value. While DBH has no significant effect on Capital Expenditures with significant value of $0.381 > 0.05$ probability value. DAK has no significant effect on Capital Expenditures with significant value of $0.219 > 0.05$ probability value. SILPA has no significant effect on Capital Expenditures with sig value of $0.305 > 0.05$ probability value. While through the F Test PAD, DBH, DAU, DAK, and SILPA simultaneously gives significant influence towards capital expenditure with a value of sig $0,000 < 0,05$ probability value. Furthermore, through t Test Capital Expenditures gives significant influence towards Economic Growth of Kupang city with significant value of $0.010 < 0.05$ probability value.

Key words: Local Own Sources Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Grant, Special Allocation Fund, Budget Financing Surplus, Capital Expenditure and Economic Growth

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan Asas Otonomi Daerah Desentralisasi, Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan. Desentralisasi Pemerintahan yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini menimbulkan beberapa masalah yang sulit dalam bidang keuangan publik salah satunya karena pemerintah daerah harus mempunyai pendapatan untuk membiayai pengeluarannya sendiri. Untuk melaksanakan fungsi dan tujuan pemerintah di atas tentu saja salah satu caranya adalah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik. Pada pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu sendiri merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. ada tiga unsur Pendapatan Daerah yaitu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dari tabel di atas dapat dilihat terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp.80.729.275.769,24,- sampai dengan Rp.165.449.023.460,93, pada tahun 2016, namun Pemerintah Kota Kupang tetap menerima Dana Perimbangan yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahunnya

dimana pada tahun 2013 sebesar Rp.611.871.015.686,- dan tahun 2016 sebesar Rp.926.862.260.026,- hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan penerimaan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembangunan infrastruktur dapat dianggarkan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja modal, oleh sebab itu perlu diperhatikan penggunaan belanja daerah secara cermat terutama belanja modal. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Namun dalam Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat bahwa baseline rata-rata belanja modal tahun 2014 adalah sebesar 19,9% sedangkan jika dilihat dari tabel penjabaran prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014, target belanja modal yang ditetapkan untuk tahun 2014 adalah sebesar 30%. Akibat dari hal tersebut pemerintah kembali menetapkan sasaran rata-rata belanja modal sampai dengan tahun 2019 adalah 30%. Sehingga untuk peningkatan belanja modal berdasarkan baseline tahun 2014 sebesar

19,9% kepada sasaran tahun 2019 sebesar 30% memerlukan usaha keras.

Menurut BPS Kota Kupang adapun presentase masyarakat miskin di Kota Kupang pada tahun 2013 sempat mengalami penurunan pada angka 8,70%, namun pada tahun 2014 kembali naik sebesar 10,21%. Oleh sebab itu pemerintah perlu untuk menangani masalah tersebut dengan baik. salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang melalui pengadaan insfrasrtuktur yang dapat memudahkan proses peningkatan perekonomian.

Itu artinya melauai belanja modal pemerintah menyediakan aset yang menunjang kegiatan pemerintahan yang bermanfaat baik secara ekonomis, sosial, maupun manfaat lainnya yang dapat menunjang dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal ini juga merupakan alat yang digunakan pemerintah pusat untuk mengelola pembangunan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah maupun negara secara keseluruhan.

Menurut Prawoto dalam bukunya pengantar Keuangan Publik (2011:367):

Untuk Desentralisasi Fiskal itu sendiri sebetulnya kita mempunyai 4 (empat) pilar yang bisa digunakan. Pilar yang dimaksud adalah pilar pengeluaran, pilar penerimaan, Pilar Transfer antar berbagai tingkatan

pemerintahan/ pemerintah daerah dan pilar pinjaman antar daerah.

Konsep Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah merupakan bentuk dari desentralisasi Fiskal yang diserahkan oleh pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Menurut Rosidin (2015:396) “Pendapatan daerah adalah sejumlah uang yang diterima daerah, baik atas hasil usahanya maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber – sumber lainnya yang sah”. Selanjutnya menurut Mahmudi(2010:135) bahwa “Secara umum Pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menembah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari konsep Pendapatan Asli Daerah di atas maka selanjutnya menurut Koirudin (2005 : 13) dapat juga dilihat bahwa :

Syarat yang harus dicapai untuk mencapai tujuan desentralisasi dalam konteks negara indonesia adalah pemerintah indonesia harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power*); memiliki pendapatan daerah (*local own income*); memiliki badan perwakilan; dan adanya kepala daerah yang dipilih sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah pada Bab V Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan itu sendiri merupakan konsekuensi dari pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bentuk otonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 288 Ayat (2) Huruf a Angka 1 disebutkan jenis- jenis Dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH); Pemerintah Daerah masih dapat meningkatkan Penerimaan Daerah dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Umum merupakan dana yang di alokasikan untuk Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mengurangi ketimpangan antar daerah yang dihitung melalui formula yang memperhitungkan kebutuhan serta potensi yang ada pada suatu daerah. Menurut Ahmad Yani (2009;143) “DAU suatu daerah

ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*)”.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Salah satu bentuk Transfer Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 1 Ayat 24 Dana Alokasi Khusus adalah: Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Ahmad Yani (2002:168)”Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi Belanja Pegawai daerah”.

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun Lalu

SILPA itu sendiri merupakan bagian dari struktur pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Kusnandar dan Siswantoro(2012) SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53,

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Menurut Abdullah dan Halim (2006):

Setiap tahun dilakukan pengadaan aset oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Secara teoritis aset tetap dapat diperoleh dengan beberapa cara yaitu dengan membangun sendiri, menukar dengan aset tetap lainnya, dan membeli.

Seiring dengan belanja modal sebagai investasi publik, seringkali pembangunan yang melalui belanja modal tidak dipahami dengan baik bahwa akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi daerah kedepannya.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya makro ekonomi (2001:10) “Pertumbuhan Ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”.

Oleh sebab itu Barang – barang modal sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Lebih lanjut Sukirno menjelaskan bahwa perkembangan dan modernisasi suatu perekonomian memerlukan modal yang sangat banyak,

karena infrastruktur harus dibangun, pendidikan harus dikembangkan dan kegiatan pemerintah harus diperluas.

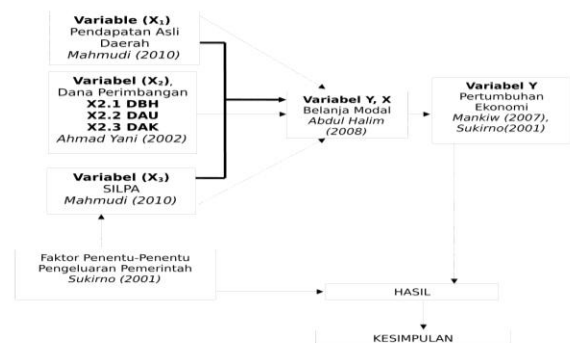
Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara maka diperlukan suatu indikator tertentu. Menurut Gregory Mankiw (2007:182) “Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom menggunakan data Produk Domestik Bruto (GDP), yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian”.

Faktor Penentu - Penentu Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sukirno (2001:151) terdapat faktor-faktor yang menjadi penentu-penentu pengeluaran pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima
2. Tujuan – tujuan ekonomi yang ingin dicapai
3. Pertimbangan Politik dan Keamanan

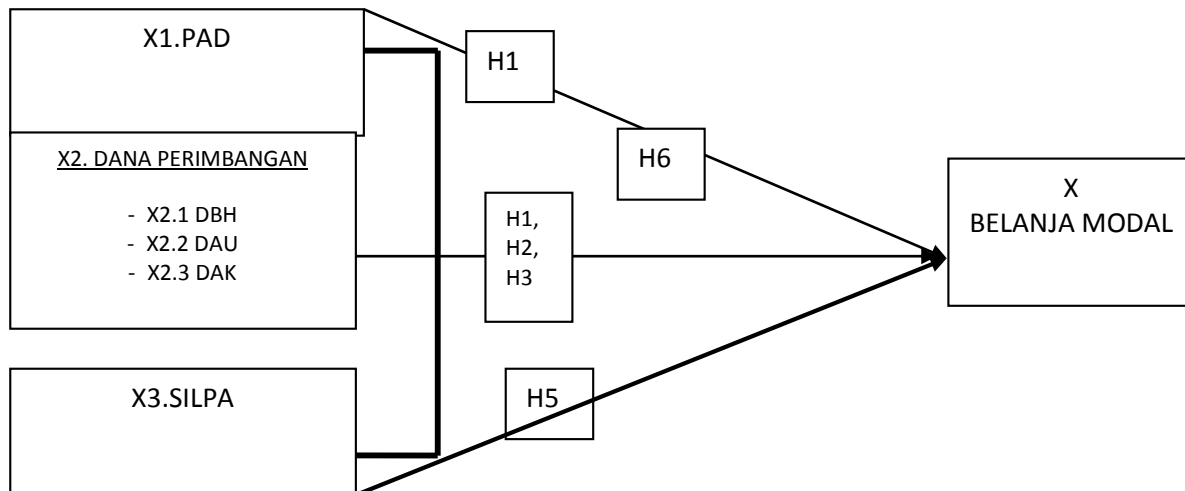
KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan kerangka pikiran diatas maka berikut adalah gambar paradigma penelitian ini:

1. Struktur Pertama untuk menunjukkan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dalam hal ini DBH, DAU dan DAK) dan SILPA terhadap Belanja Modal



Sumber : Diolah Penulis, 2018

Keterangan :

H = Hipotesis

X1 = PAD

X2 = Dana Perimbangan

X2.1 = DBH

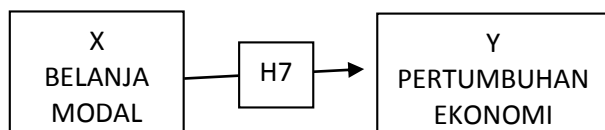
X2.2 = DAU

X2.3 = DAK

X3 = SILPA

Y = Belanja Modal

2. Struktur kedua untuk menunjukkan pengaruh atau dampak Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : Diolah Penulis, 2018

Keterangan :

H = Hipotesis

X = Belanja Modal

Y = Pertumbuhan Ekonomi

HIPOTESIS

1. Ho = Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang
Ha = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang
2. Ho = Dana Bagi hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kota Kupang
Ha = Dana Bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang
3. Ho = Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang

- Ha = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang
4. Ho = Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang
Ha = Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang
5. Ho = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang
Ha = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang
6. Ho= PAD, DBH, DAU, DAK dan SILPA tidak berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang.
Ha= PAD, DBH, DAU, DAK dan SILPA berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang.
7. Ho = Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kota Kupang
Ha =Belanja Modal, berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kota Kupang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian campuran atau *Mixed Methods*, dengan model *sequential explanatory*, dimana pengumpulan data dan analisis kuantitatif dilakukan pada tahap pertama dengan menggunakan data sekunder dengan populasi Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Produk Domestik Regional Bruto

Pemerintah Kota Kupang dengan sampel selama 13 tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017.

Selanjutnya diikuti dengan pengumpulan data dan analisis data kualitatif pada tahap ke dua melalui wawancara, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian, maka metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh parsial melalui Uji t maupun simultan melalui Uji F dari PAD, DBH, DAU, DAK, dan SILPA terhadap Belanja Modal adalah Regresi Linier Berganda dengan persamaan sebagai berikut: Bentuk persamaan model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y' = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Belanja Modal
a = intersep
X1 = Pendapatan Asli Daerah
X2.1 = Dana Bagi Hasil
X2.2 = Dana Alokasi Umum
X2.3 = Dana Alokasi Khusus
X3 = SILPA
e = Error/ kesalahan

Sedangkan untuk menguji Dampak Belanja Modal kepada Pertumbuhan Ekonomi digunakan Uji t melalui Regresi Linier Sederhana dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y' = a + b X$$

Keterangan:

- Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)
 X = Variabel independen
 a = Konstanta (nilai Y' apabila X = 0)
 b = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan atau nilai penurunan Variable Y

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda Pengaruh PAD (X1), DBH (X2.1), DAU (X2.2), DAK (X2.3), SILPA (X3), terhadap Belanja Modal (Y)

a. Uji Normalitas

Ghozali (2011:160) menjelaskan bahwa:

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Tabel 1

Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov* PAD (X1), DBH (X2.1), DAU (X2.2), DAK (X2.3), SILPA (X3), terhadap Belanja Modal (Y)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
		13
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000242
	Std. Deviation	16228333543.78207000
Most Extreme Differences	Absolute	.152
	Positive	.152
	Negative	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		.549
Asymp. Sig. (2-tailed)		.924
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Selanjutnya Ghozali (2013) menyatakan sebagai berikut:

- Jika hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan > 0.05 maka data residual terdistribusi dengan normal
- Jika hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan < 0.05 maka data residual tidak terdistribusi normal

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa nilai signifikansi residual sebesar 0,924 > 0,05 artinya data berdistribusi normal sehingga data tersebut dapat dikatakan memenuhi persyaratan untuk analisis regresi karena memenuhi persyaratan normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Sugiyono (2014:182) Uji Multikolinieritas dilakukan untuk

mengetahui terjadi tidaknya multikolinieritas antar variabel bebas dan dilakukan dengan menyelidiki besarnya interkorelasi antar variabel bebas.

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh variable memiliki nilai VIF dibawah 10 dan atau tolerance *value* di atas 0,10. Nilai VIF dan tolerance tersebut menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 2
Nilai Tolerance dan Nilai VIF Pada Uji
Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD (X1)	.111	9.025
	DBH (X2.1)	.802	1.247
	DAU (X2.2)	.111	9.015
	DAK (X2.3)	.313	3.192
	SILPA (X3)	.343	2.914
a. Dependent Variable: BELANJA MODAL (Z)			

Menurut Ghazali (2011:110):

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Run Test. Berikut adalah hasil uji autokorelasi menggunakan Run Test:

Table 3
Uji Autokorelasi

Runs Test	
	STANDARDIZED RESIDUAL
Test Value ^a	.02902
Cases < Test Value	6
Cases >= Test Value	7
Total Cases	13
Number of Runs	8
Z	.022
Asymp. Sig. (2-tailed)	.982
a. Median	

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Hasil Output SPSS menunjukan bahwa Nilai Run Test adalah 0,02902 dengan Probabilitas signifikan 0,982 > 0,05 yang berarti bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghazali (2011:139) mengatakan bahwa: “Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Adapun uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji *Glejser*.

Tabel 4
Uji Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2070795172.936	17173573261.477		-.121	.907
	PAD (X1)	-.059	.156	-.361	-.381	.714
	DBH (X2.1)	.468	.463	.356	1.011	.346
	DAU (X2.2)	.031	.065	.456	.482	.644
	X2.3 (DAK)	-.095	.103	-.521	-.925	.386
	X3 (SILPA)	-.016	.148	-.058	-.109	.917

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan Uji *Glejser* dari tabel di atas tampak bahwa data terbebas dari hetorekedastisitas karena nilai probabilitas signifikan dari seluruh masing-masing variabel independen terhadap variable dependen lebih dari 0,05.

2. Uji Normalitas Regresi Linier Sederhana Dampak Belanja Modal (X) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Uji normalitas ini pun menggunakan uji kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya Ghozali (2013) menyatakan sebagai berikut:

- Jika hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan > 0.05 maka data residual terdistribusi dengan normal
- Jika hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan < 0.05 maka data residual tidak terdistribusi normal

Tabel 5
Uji Normalitas Dampak Belanja Modal (X) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		13
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-1E-7
	Std. Deviation	4022746619.61797860
Most Extreme Differences	Absolute	.209
	Positive	.182
	Negative	-.209
Kolmogorov-Smirnov Z		.754
Asymp. Sig. (2-tailed)		.620
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa nilai signifikansi residual sebesar $0,620 > 0,05$ artinya data berdistribusi normal sehingga data tersebut dapat dikatakan memenuhi persyaratan untuk analisis regresi karena memenuhi persyaratan normalitas (data berdistribusi normal).

3. Uji Statistik

Tabel 6
Uji t Pengaruh PAD (X1), DBH (X2.1), DAU (X2.2), DAK (X2.3) dan SILPA (X3) terhadap Belanja Modal (Y)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	87451574250.534	31058735116.311		2.816	.026
	PAD	1.536	.282	1.300	5.454	.001
	DBH	.783	.837	.083	.935	.381
	DAU	-.348	.118	-.702	-2.949	.021
	DAK	.251	.186	.191	1.351	.219
	SILPA	.296	.268	.150	1.108	.305

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: diolah penulis, 2018

1. Hasil Uji t Hipotesis 1: Pengaruh PAD (X1) terhadap Belanja Modal (Y)

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien dapat dituliskan dalam persamaan struktural $Y = 1,300 X_1$, dengan nilai t tabel $2,447 < t$ hitung sebesar 5,454. Hasil analisis uji kebermaknaan (*test of significance*) untuk koefisien tersebut menunjukkan nilai sig sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau $(0,001) < (0,05)$. Berdasarkan keterangan di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya PAD (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan saat penelitian dengan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Kupang bahwa “Sampai saat ini walaupun realisasi penerimaan pajak Pemerintah Kota Kupang telah lebih dari target namun masih banyak potensi yang belum digali dengan baik untuk menunjang penerimaan dari sektor pajak”.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa walaupun peningkatan PAD Kota Kupang sangat pesat namun belum semua potensi sumber penerimaan dimaksimalkan untuk mendukung penerimaan daerah. Hal ini tentu saja juga mempengaruhi besaran belanja daerah, karena jumlah PAD daerah Kota Kupang sangat rendah untuk mendukung besaran belanja daerah.

2. Hasil Uji t Hipotesis 2: Pengaruh DBH (X2.1) terhadap Belanja Modal (Y)

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien dapat dituliskan dalam persamaan struktural $Y = 0,083 X_{2.1}$, dengan nilai t tabel $2,447 > t$ hitung sebesar 0,935. Hasil analisis uji kebermaknaan (*test of significance*) untuk koefisien tersebut menunjukkan nilai sig sebesar 0,381 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 atau $(0,381) > (0,05)$. Berdasarkan keterangan di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya DBH (X2.1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y)

Hal ini tidak sejalan dengan tujuan desentralisasi. Karenan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dijelaskan bahwa “DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Menurut Rosidin (2015:77) bahwa tujuan utama desentralisasi adalah:

1. Tujuan politik, yang ditunjukan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk mewujudkan partisipasi politik nasional.
2. Tujuan ekonomis, untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya Wakil Walikota Kupang juga berpendapat bahwa:

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Kupang besarnya tidak

sampai 20% dari belanja daerah sehingga jumlah ini tidak cukup bila digunakan untuk menunjang seluruh belanja. Apalagi untuk menunjang investasi dan pembangunan infrastruktur. Sehingga penerimaan pendapatan pemerintah kota kupang terbesar berasal dari DAU dan DAK.

3. Hasil Uji t Hipotesis 3: Pengaruh DAU (X2.2) terhadap Belanja Modal (Y)

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien dapat dituliskan dalam persamaan struktural $Y = -0,702 X_{2.2}$, dengan nilai t tabel $2,447 <$ dari t hitung sebesar $-2,949$. Hasil analisis uji kebermaknaan (*test of significance*) untuk koefisien tersebut menunjukkan nilai sig sebesar 0,021 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau $(0,021) < (0,05)$. Berdasarkan keterangan di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya DAU (X2.2) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Hal ini sejalan dengan pendapat Yani (2006:143) bahwa:

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar publik yang dimaksudkan antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa salah satu point penting diberikannya DAU dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah penyediaan infrastruktur dimana penyediaan infrastruktur umum merupakan jenis belanja yang dibiayai pemerintah daerah melalui belanja modal.

4. Hasil Uji t Hipotesis 4: Pengaruh DAK (X2.3) terhadap Belanja Modal (Y)

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien dapat dituliskan dalam persamaan struktural $Y = 0,191 X_{2.3}$, dengan nilai t tabel $2,447 >$ dari t hitung sebesar $1,351$. Hasil analisis uji kebermaknaan (*test of significance*) untuk koefisien tersebut menunjukkan nilai sig sebesar 0,305 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 atau $(0,305) > (0,05)$. Berdasarkan keterangan di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya DAK (X2.3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y)

Hal ini tidak sejalan dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus adalah Dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Selanjutnya menurut Yani

(2009:166) bahwa “Kegiatan khusus yang ditetapkan pemerintah kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang termasuk sarana pengadaan fisik yang penunjang”.

5. Hasil Uji t Hipotesis 5: Pengaruh SILPA (X3) terhadap Belanja Modal (Y)

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien dapat dituliskan dalam persamaan struktural $Y = 0,150 X_3$, dengan nilai t tabel $2,447 >$ dari t hitung sebesar $1,108$. Hasil analisis uji kebermaknaan (*test of significance*) untuk koefisien tersebut menunjukkan nilai sig sebesar $0,305$ lebih besar dari nilai probabilitas $0,05$ atau $(0,021) > (0,05)$. Berdasarkan keterangan di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya SILPA (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y)

Melalui hasil penelitian perhitungan kuantitatif sebelumnya dalam penelitian ini diketahui bahwa SILPA di Kota Kupang tidak berpengaruh kepada belanja modal pada Pemerintah Kota Kupang hal ini disebabkan karena pemerintah Kota Kupang lebih menjadikan kenaikan belanja pegawai sebagai prioritas untuk menggunakan SILPA.

6. Hasil Uji F Hipotesis 6: Pengaruh secara simultan PAD (X1), DBH (X2.1), DAU (X2.2), DAK (X2.3), SILPA (X3), terhadap Belanja Modal (Y)

Tabel 7						
Uji F – Struktur 1 Pengaruh PAD (X1), DBH (X2.1), DAU (X2.2), DAK (X2.3), SILPA (X3) terhadap Belanja Modal (Y)						
ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	686213346 468299400 00000.000	5	1372426 6929365 9880000 00.000	30.399	.000 ^b
	Residual	316030571 529888750 0000.000	7	4514722 4504269 8200000 .000		
	Total	717816403 621288300 00000.000	12			
a. Dependent Variable: BELANJA MODAL						
b. Predictors: (Constant), SILPA, DBH, PAD, DAK, DAU						

Sumber: Diolah Penulis, 2018

Berdasarkan table Uji F di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 30,399, oleh sebab itu nilai F hitung $(30,399) >$ dari F tabel $(3,972)$. Hasil analisis uji kebermaknaan (*test of significance*) secara simultan, menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau $(0,021) < (0,05)$. Berdasarkan keterangan di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya secara simultan PAD (X1), DBH (X2.1), DAU (X2.2), DAK (X2.3), dan SILPA (X3)

berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Adapun besaran kontribusi pengaruh secara simultan PAD (X1), DBH (X2.1), DAU (X2.2), DAK (X2.3), dan SILPA (X3) terhadap Belanja Modal (Y) yang diberikan dapat dilihat pada perhitungan koefisien determinasi dalam tabel berikut ini.

Tabel 8
Besarnya Pengaruh PAD (X1), DBH (X2.1), DAU (X2.2), DAK (X2.3), dan SILPA (X3) terhadap Belanja Modal (Y)

Sumber: Diolah Penulis, 2018

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.978 ^a	.956	.925	21247876247.82059
a. Predictors: (Constant), SILPA, DBH, PAD, DAK, DAU				

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah dapat bersumber dari berbagai pendapatan dan penerimaan pembiayaan.

Pada tabel model summary di atas dapat dilihat Besarnya koefisien determinan Rsquare atau $R^2 = 0,956 = 95,6\%$, yang berarti Belanja modal Pemerintah Kota Kupang secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh PAD (X1), DBH (X2.1), DAU (X2.2), DAK (X2.3), dan SILPA (X3) sebesar 95,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga berdasarkan koefisien determinasi tersebut maka besarnya pengaruh variable lain (ϵ) = $1 - 0,956 = 0,044 = 4,4\%$. Selanjutnya dapat ditentukan persamaan regresi linear berganda dari hasil analisis data dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_{2.1} + b_2X_{2.2} + b_2X_{2.3} + b_3X_3 + \epsilon$$

$$Y = 87451574250.534 + 1,300 X_1 + 0,083X_{2.1} + (-0,702)X_{2.2} + 0,191X_{2.3} + 0,150 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Variabel Belanja Modal

X₁ = Variabel PAD

X_{2.1} = Variabel DBH

X_{2.2} = Variabel DAU

X_{2.3} = Variabel DAK

X₃ = Variabel SILPA

ϵ = Kesalahan dalam model regresi berganda

7. Analisis Regresi Linier Sederhana Struktur 2– Uji t Pengaruh Belanja Modal (X) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Struktur 2 merupakan struktur yang dimaksudkan untuk menguji Hipotesis 7. Melalui struktur dan persamaan struktur 2 pada penelitian ini maka dapat dilakukan analisis jalur untuk menguji hipotesis yang telah di buat dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 9
Uji t –Struktur 2 Pengaruh Belanja Modal (X) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1861331103.714	2152097441.554		.865	.406
	BELANJA MODAL	.049	.016	.682	3.093	.010
a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI						

Sumber: diolah penulis, 2018

Dari hasil perhitungan regresi sederhana di atas, hasil analisis uji kebermaknaan (*test of significance*) untuk koefisien tersebut menunjukkan nilai sig sebesar 0,010 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau (0,010) > (0,05).

Tabel 10
Besarnya Pengaruh PAD (X1), DBH (X2.1), DAU (X2.2), DAK (X2.3), dan SILPA (X3) terhadap Belanja Modal (Y)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 ^a	.465	.417	4201621812.28083
a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL				
b. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI				

Sumber: Diolah Penulis, 2018

Jika dilihat dari hasil regresi Belanja Modal (X) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di atas, maka dengan besaran pengaruh koefisien jalur sebesar 0,682 didapati pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 46,51%. Berdasarkan keterangan di atas maka diperoleh

kesimpulan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya Belanja Modal (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) Oleh sebab itu maka berikut adalah dapat ditentukan persamaan regresi linear berganda dari hasil analisis data dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 1861331103.714 + 0,682X$$

Keterangan :

Y = Variabel Pertumbuhan Ekonomi

X = Variabel Belanja Modal

Hasil penelitian di atas sejalan dengan pernyataan Widodo dalam Halim (2016:211) bahwa:

Bank dunia pada tahun 2011 mengingatkan kepada Pemerintah Indonesia bahwa belanja modal dapat berpengaruh terhadap kinerja berbagai badan pemerintah karena apabila Pemerintah Indonesia mampu untuk melakukan belanja modal

secara bijaksana, maka diharapkan akan mampu memberikan multiplier effect dalam perekonomian nasional.

Dalam mendistribusikan pendapatan daerah ke dalam belanja daerah haruslah memperhatikan berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Halim (2002:7) berpendapat bahwa disadari atau tidak penentuan kebutuhan akan investasi publik akan berkaitan dengan anggaran yang disediakan dan ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memasukkannya ke dalam prioritas perencanaan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wakil Walikota Kupang bahwa Pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian termasuk di dalam prioritas pembangunan pemerintah kota kupang seperti dalam RPJMD, di mana Visi dan misi Pemerintah Kota Kupang yang bertujuan untuk memperkuat dan mandiri dalam hal perekonomian perkotaan.

8. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Pendapatan terhadap Belanja Modal yang Berdampak Kepada Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Kupang.

Menurut Sukirno (2001:151) terdapat faktor-faktor yang menjadi penentu-penentu pengeluaran pemerintah yaitu selain Proyeksi Jumlah Pajak yang diterima dan tujuan – tujuan ekonomi yang ingin dicapai, adapun Pertimbangan Politik

dan Keamanan yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Peran pemerintah daerah sebagai mobilisator pembangunan sangatlah penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan Todaro dan Smith (2011:170) bahwa:

Akumulasi Modal (*Capital Accumulation*) akan terjadi jika sebagian tertentu dari pendapatan sekarang ditabung dan diinvestasikan untuk meningkatkan output dan pendapatan dimasa depan. Pabrik, mesin, peralatan, dan bahan baru meningkatkan persediaan modal atau kapasitas (*Capital Stock*) Fisik suatu Negara (Total nilai riil netto semua barang modal fisik produktif) yang memungkinkan upaya mempertinggi tingkat output yang akan dicapai. Investasi langsung yang produktif ini dilakukan dengan berinvestasi dalam apa yang dikenal sebagai Infrastruktur Ekonomi (*Economic Infrastructure*) dan sosial – jalan raya, listrik, air bersih dan sanitasi, komunikasi, dan yang sejenis yang memfasilitasi dan

mengintegrasikan kegiatan perekonomian.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang bahwa :

Kalau investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja modal lewat penggunaan infrastruktur itu secara otomatis akan memacu pertumbuhan ekonomi. Contohnya seperti jalan, dengan kita membuka jalan diseluruh ruas jalan dalam wilayah di Kota Kupang akan mempermudah aktifitas ekonomi masyarakat baik yang bersifat konsumsi maupun dari kantong produksi ke market akan memperpendek dan mempercepat arus orang dan barang otomatis akan memacu pertumbuhan ekonomi. Dan investasi pemerintah lewat penataan perbaikan infrastruktur itu berdampak cukup luas terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah yang dirasakan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat kota yang dengan sendirinya memacu pendapatan asli daerah dengan kata lain infrastruktur termasuk dalam prioritas perencanaan pemerintah Kota Kupang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besaran alokasi belanja modal yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah Kota Kupang terbagi atas 2 yaitu:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya alokasi belanja modal yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah Kota Kupang yaitu sebagai berikut :
 1. Tidak sinkronnya besaran sasaran alokasi belanja modal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Pusat tahun 2015-2019 dengan penetapan belanja modal yang ada di Kota Kupang setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena sasaran alokasi belanja modal yang ditetapkan pemerintah pusat adalah sebesar 30%, dari total belanja daerah.. Sedangkan alokasi belanja modal di Kota Kupang belum mencapai 30%.
 2. Pemerintah Kota Kupang masih menjadikan belanja pegawai sebagai prioritas anggaran sehingga belanja pegawai mendominasi besaran alokasi belanja daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang meskipun telah dapat melebihi target namun belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah dan belanja daerah karena potensi pajak daerah Kota Kupang belum dapat digali secara maksimal.
- b. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya alokasi belanja modal di atas, berikut adalah faktor-faktor mendukung meningkatnya alokasi belanja modal Pemerintah Kota Kupang yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah Kota Kupang:
 1. Adanya janji - janji politik yang harus dipenuhi oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Kupang kepada masyarakat saat melakukan kampanye sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 2. Adanya alasan keamanan dan ketentraman masyarakat yang menjadi alasan Pemerintah Kota Kupang mempertimbangkan untuk meningkatkan pembangunan

Infrastruktur yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa melalui Uji t, secara parsial Variable PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal dimana nilai sig $0,001 < \text{nilai probabilitas } 0,05$. DAU secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai sig $0,021 < \text{nilai probabilitas } 0,05$. Sedangkan DBH secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal dengan nilai sig $0,38 > \text{nilai probabilitas } 0,05$. DAK secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai sig $0,219 > \text{nilai probabilitas } 0,05$. SILPA tahun lalu secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai sig $0,305 > \text{nilai probabilitas } 0,05$. Sedangkan melalui Uji F PAD, DBH, DAU, DAK, dan SILPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai sig $0,000 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ dengan besar pengaruh atau koefisien determinannya sebesar $0,956$ atau $95,6\%$. Selanjutnya melalui Uji t Belanja Modal memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota Kupang dengan nilai sig $0,010 < \text{nilai probabilitas } 0,05$.

Hasil dari penelitian kuantitatif di atas juga didukung oleh hasil penelitian kualitatif melalui wawancara. Oleh sebab itu berdasarkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan maka peneliti memberikan

beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan Perbaikan dan peningkatan *fiscal capacity* melalui penguatan *local taxing power* melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang dialokasikan melalui belanja modal
3. Melakukan peningkatan atau perbaikan belanja daerah dengan penetapan jumlah belanja modal yang sesuai dengan presentase sasaran belanja modal yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu sebesar 30% dari total belanja daerah.
4. Melakukan moratorium penerimaan pegawai, baik pegawai Honorer maupun Pegawai Negeri Sipil agar untuk sementara waktu belanja yang dialokasikan untuk belanja pegawai dapat dikurangi dan kemudian dialokasikan untuk belanja yang member efek ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang seperti belanja modal.
5. Penyusunan anggaran harus didasarkan kepada aspirasi dan kebutuhan publik dengan memperhatikan urgensi setiap dokumen perencanaan daerah yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian daerah Kota Kupang
6. Perlu dilakukan proyeksi kebutuhan infrastruktur daerah Kota Kupang agar dapat dialokasikan melalui belanja modal untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah Kota Kupang.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Achmad Kuncoro, Engkos dan Ridwan. 2007. *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Achmad Kuncoro, Engkos dan Ridwan. 2008. *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Asyaidah, Devi. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Baay, Megawati. 2017. *Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara, 2010-2015*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Fitri, Vella Kurniasih. 2012. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2012*. Universitas Riau. Pekanbaru
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponogoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- _____. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- _____. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik – Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- _____. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuspita, Maya. 2015. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SILPA terhadap Realisasi Belanja Modal serta Pengaruh Realisasi Belanja Modal, Inventasi Swasta dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Mankiw, Gregory. 2007. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga
- _____, Euston Quah, Peter Wilson. 201. *Pengantar Makroekonomi. Principles Of Economy an Asian Edition- Volume 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Nazir, Moh. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- . 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Smith, Brian C. 2012. *Decentralization*. Jakarta Selatan: MIPI Kampus IPDN

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan tindakan*. Bandung: PT. RefikaAditama.
- Sukirno, Sadono. 2001. *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi Kedua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith.2009. *Pembangunan Ekonomi. Edisi ke-11 Jilid* .Jakarta: Erlangga
- Widarjono, Agus. 2017. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi Disertai Panduan Eviews*.Yogyakarta : UPP.STIM YKPN.
- Winter, William. 1980. *State and local Government in a Decentralized Republic*. United States of America: Macmillan Publishing Co., INC.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Sumber Lain :

- Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016, dalam hasil penelitian di 70 Kabupaten/Kota oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia (Seknas FITRA) dan *The Ford Foundation* (FF)
- Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (MP3EI)
- Outlook* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2010 – 2014
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015 – 2019
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2017

Statistik Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

<http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-asumsi-klasik.html>

<https://mardanijournal.wordpress.com/2017/03/05/asumsi-klasik-regresi-linear-berganda/>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726>